

**STUDI DESKRIPTIF DAMPAK KEBERLANJUTAN PROGRAM PNPM MANDIRI  
PEDESAAN TERHADAP KETERGANTUNGAN BANTUAN DANA STIMULAN PADA  
PENGUSAHA PEREMPUAN DI DUSUN CARANGPUSPO DESA CARANGREJO  
KABUPATEN JOMBANG JAWA TIMUR**

**Desy Setiyani Putri**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

**Abstract**

*This study aims to describe the impact of the sustainability of PNPM Mandiri Rural Program on the dependence of female stimulant business support in Carangpuspo Village, Carangrejo Village, Jombang Regency, East Java. This is motivated by one of the important efforts in poverty alleviation in rural areas. Likewise in Jombang district in supporting poverty alleviation that occurs in all rural areas then follow the PNPM Mandiri Rural Program. This research uses descriptive qualitative research method. Data collection techniques used observation methods, document studies and in-depth interviews. The determination of informants was done by purposive sampling where the individual chosen as informant was the individual who knew the research topic, that is the impact of sustainability of PNPM Mandiri Rural program on the dependency of female entrepreneur stimulation fund in Carangpuspo Village, Carangrejo Village, Jombang Regency, East Java. In addition, this study also uses snowball sampling. Data analysis using qualitative analysis refers to Sugiyono with data reduction stage, data presentation and draw conclusion.*

*The result of the research indicates that the sustainability of the PNPM Mandiri Rural Program is capable of causing a negative impact in the form of dependence on stimulant fund aid to new entrepreneurs who start the business from the loan. There are several factors that cause the emergence of dependence on new entrepreneurs are internal factors, economic conditions in the community and the intensity of the provision of stimulant funds. From the data obtained this dependence has an impact on the economic situation of new female entrepreneurs, the impact on the use of stimulant funds and also the increased dependence*  
Keywords: sustainability of PNPM Program, dependency and The Impact

**PENDAHULUAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang dampak keberlanjutan program PNPM Mandiri Pedesaan terhadap ketergantungan bantuan dana stimulan pada pengusaha perempuan di Dusun cCarangpuspo Desa Carangrejo Kabupaten Jombang.

Menurut Undang – undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Berbagai program penanganan kemiskinan sudah dilakukan pemerintah melalui berbagai kementerian yang ada di Negara Indonesia, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dll.

Jenis program yang sudah dilaksanakan misalnya: Program Kompensasi Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Non Tunai Beras untuk rakyat Miskin(RASKIN), Asuransi Kesehatan Orang Miskin (ASKESKIN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Keluarga Miskin- Inpres Delta (BKM IDT),

Jaring Pengaman Sosial (JPS), PEMP, LUEB P2PK dan bantuan lainnya.

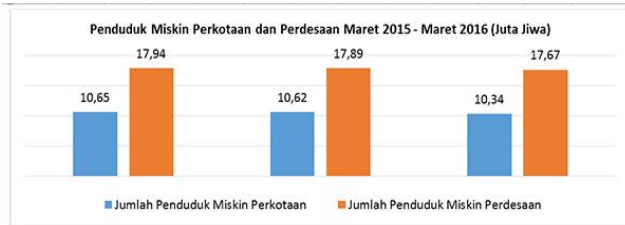
Salah satu Program pengentasan kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan). Implementasinya sejak tahun 2007 dikembangkan Program PNPM hingga kini masih berlanjut dan masih merupakan program yang andalan di Kementerian Sosial Republik Indonesia. PNPM Mandiri Pedesaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara

langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

**Tabel 1.1**

**Jumlah penduduk miskin di perkotaan dan di pedesaan Maret 2015 – Maret 2016**



Sumber: BPS, diolah SPI

Dengan adanya tabel 1.1, untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan pemerintah berusaha untuk membangun perekonomian pedesaan, sehingga masyarakat miskin yang ada di desa menurun. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

“Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari:

1. Transparansi dan Akuntabilitas
2. Desentralisasi.
3. Keberpihakan pada Orang/ Masyarakat Miskin.
4. Otonomi.
5. Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.
6. Prioritas Usulan.
7. Kesetaraan dan Keadilan Gender.
8. Kolaborasi.
9. Keberlanjutan.
10. Demokratis”

Prinsip-prinsip dalam PNPM Mandiri Perdesaan juga dikenal dengan sebutan SiKOMPAK. Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harafiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk

kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Melalui SiKOMPAK ini diharapkan kemandirian desa dapat terwujud.

PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut:

1. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan
2. Proses Partisipatif Pemetaan Rumahtangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumahtangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk mengagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya
3. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) satu laki-laki, satu perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing, untuk Menggagas Masa Depan Desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/ gagasan dari masyarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
4. Seleksi/ Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan

memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (*negative list*). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdani, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

5. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendisain sarana/ prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/ prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat
6. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).

Kabupaten Jombang sebagai lokasi Program Pengembangan Kecamatan ( PPK ) sejak tahun 2003 ( PPK Fase II ) dan dilanjutkan dengan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008, dengan jumlah lokasi sebanyak 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Plandaan, Wonosalam, Mojowarno, Kabuh, Bareng, Ngoro, Tembelang, Sumobito dan Kesamben, pada tahun 2007 kecamatan Mojowarno berubah menjadi lokasi P2KP. Pada Tahun 2009 Kabupaten Jombang mendapat tambahan 2 kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yaitu Kecamatan Gudo dan Perak, sehingga jumlah lokasi PNPM-MP menjadi 10 kecamatan. Dan pada tahun 2010 terdapat tambahan 4 lokasi kecamatan yaitu Kecamatan Ngusikan, Ploso, Megaluh dan Bandar Kedungmulyo, sehingga jumlah kecamatan aktif menjadi 14 kecamatan.

Tabel 1.2

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang

Tahun	Pra Sejahtera	Sejahtera	Jumlah
2008	81.189	102.876	184.065
2009	80.280	108.113	188.393
2010	77.912	113.662	191.574
2011	78.678	195.079	273.757
2012	7869	265.888	273.757
2013	7590	266.167	280.757
2014	7345	266.412	283.757
2015	7134	266.623	296.896
2016	6915	266.482	299.876

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang

Dari jumlah penduduk miskin yang ditunjukkan oleh tabel 1.2, dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang tergolong tinggi. Angka kemiskinan masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang sendiri mencapai 10% dari total keseluruhan penduduk yang ada di Kabupaten Jombang. Pada tahun 20012 angka kemiskinan masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang memang mengalami penurunan, karena adanya dampak dari Program PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jombang.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apatisipasi dari CSR (Corporante Social Responcibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia

Program PNPM Mandiri Pedesaan selama ini mendapatkan bantuan dana alokasi dari APBN dan APBD. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemberian bantuan alokasi dana untuk program PNPM Mandiri Pedesaan ini setiap tahunnya tidak sama. Dana yang diberikan pada program PNPM Mandiri Pedesaan ini memang diberikan sesuai dengan pendapatan yang didapatkan oleh negara dan pada daerah pada tahun itu. Jumlah alokasi dana yang diberikan pada setiap tahunnya memang tidak sama. Hal ini dikarenakan pada awal tahun pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan kecamatan yang menerima bantuan pada program PNPM Mandiri Pedesaan masih sedikit. Namun dengan seiring berjalannya program PNPM Mandiri Pedesaan dana yang diberikan pemerintah dapat berkembang karena adanya bunga yang diberlakukan pada simpan pinjam perempuan PNPM Mandiri Pedesaan.

Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo adalah desa yang secara religius sebagian besar muslim, secara faktor ekonomi di Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo sendiri banyak bergerak dibidang sektor pertanian. Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo sendiri merupakan salah satu dusun yang masyarakat perempuannya beberapa menggunakan bantuan dana stimulan yang berupa simpan pinjam perempuan. Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo termasuk dalam Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Dalam beberapa tahun ini PNPM Mandiri Pedesaan di Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo memang dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi di dusun tersebut. Sesuai dengan tujuan dari PNPM Mandiri Pedesaan yakni mengembangkan potensi warga di dusun tersebut dengan memberikan sejumlah bantuan dana stimulan yang nantinya mampu digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masyarakat di Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo sangat berperan aktif dan atau berpartisipasi dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana. Bantuan dana stimulan yang ini sudah diberikan sejak tahun 2007 di dusun carang puspo desa carang rejo dan masih berlangsung. Sebagai kriteria pembangunan berkelanjutan program PNPM ini dianggap berhasil untuk mevncai tujuannya, sehingga program pemberdayaan ini masih berlangsung.

Namun seiring dengan berjalan nya PNPM Mandiri pedesaan ini menimbulkan permasalahan yang baru. Selama program PNPM Mandiri ini berjalan terdapat dampak yang positif dan dampak yang negatif. Dampak negatif yang timbul akibat program ini berlangsung memang sering diabaikan oleh pemerintah karena memang program ini memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga dampak yang lain dari pada itu sering diabaikan. Dampak yang timbul

dari adanya keberlanjutan program PNPM Mandiri ini sendiri adalah timbulnya ketergantungan dari masyarakat, terutamanya kaum perempuan yang ada di Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo yang memang menggunakan dana tersebut secara terus menerus. Banyak kaum perempuan juga yang menggunakan dana tersebut setiap periodenya. Ketergantungan yang timbul dalam permasalahan ini sebab banyak dari mereka yang menggunakan dana stimulan ini juga untuk membatu perekonomiannya seperti menjadikan modal dari usaha mereka.

Selain itu alokasi dana yang digunakan untuk program PNPM Mandiri yang berasal dari APBD dan APBN memang disesuaikan dengan pemasukan dari anggaran yang ada pada APBN dan APBD sehingga jika dilihat dari tabel diatas pada tahun 2014 yang seharusnya ada peningkatan namun justru terdapat penurunan karena memang anggaran dari APBN mengalami penurunan. Sehingga adanya penurunan anggaran pada APBN juga mampu mempengaruhi alokasi dana untuk program PNPM Mandiri Pedesaan.

Sesuai dengan tupoksinya, maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep lah yang berkewajiban membenahi permasalahan tersebut, melalui penyediaan berbagai fasilitas-fasilitas seperti tempat penginapan,kebutuhan air bersih, tranportasi laut dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Karena sejauh ini pelayanan fasilitas masih minim terutama dalam hal pelayanan transportasi laut menuju pulau gili labak. Para wisatawan yang berkunjung ke pulau tersebut masih menggunakan perahu kecil milik nelayan sekitar yang kualitas keselamatannya masih sangat kurang. Kurangnya fasilitas layanan di Gili Labak akan membuat potensi besar yang dimiliki oleh obyek wisata ini menjadi mubazir dan tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya yang maksimal.

**Tabel 1.5**

**Rincian Peningkatan Jumlah Penerima Bantuan Dana Simpan Pinjam Di Desa Carangrejo Kabupaten Jombang**

No	Tahun	Anggota
1	2008	40
2	2009	50
3	2010	70
4	2011	100
5	2012	110

6	2013	120
7	2014	150
8	2015	170
9	2016	180

Sumber : Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) kecamatan kesamben

Dari tabel 1.5 dapat diketahui bahwa pada setiap tahunnya pengguna bantuan dana stimulan mengalami peningkatan. Peningkatan terhadap partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu indikator bahwasannya masih banyak masyarakat yang masih ingin menggunakan bantuan dana stimulan, dan hal ini juga mampu meningkatkan ketergantungan pada para pengusaha perempuan.

Masyarakat yang menggunakan bantuan simpan pinjam perempuan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Carangrejo tidak hanya untuk modal awal usaha mereka melainkan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial. Adanya dana simpan pinjam perempuan PNPM Mandiri Pedesaan ini dapat membantu meningkatkan perekonomian para pengusaha perempuan baru yang ada di Desa Carangrejo. Timbulnya ketergantungan pada pengusaha perempuan baru di Desa Carangrejo ini membuat pemerintah belum mampu menggantu program PNPM Mandiri Pedesaan dengan program pengentasan kemiskinan lainnya.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Bagaimanakah dampak keberlanjutan dari program pemberdayaan masyarakat PNPM terhadap bantuan dana stimulan pengusaha perempuan baru di Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo Kabupaten Jombang Jawa Timur

Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat Akademisnya yakni Penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengetahui menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah dampak dari keberlanjutan dari program pemberdayaan masyarakat pedesaan PNPM terhadap bantuan dana stimulan pengusaha perempuan baru di dusun carang puspo desa carangrejo kabupaten jombang jawa timur dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam penerapan ilmu khususnya Ilmu Administrasi Negara dalam hal dampak dari keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat yang mampu menimbulkan ketergantungan terhadap pengusaha perempuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif

dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ditetapkan secara *puposive* di Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo Kabupaten Jombang, Jawa Timur dan juga di Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive dan snowball sampling* bertujuan memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang dimungkinkan ada, juga untuk mengetahui dan mengulas lebih dalam proses keberlanjutan program PNPM Mandiri Pedesaan terhadap ketergantungan yang terjadi pada masyarakat perempuan yang ada di Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo Kabupaten Jombang Jawa Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### Kemiskinan Masyarakat

kemiskinan masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan bagi Dinas Sosial mendefinisikan orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*).

### Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Undang – undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan memiliki sebuah tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Penbangan berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa yang akan mendatang. Laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai

terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat.

Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam. Dengan demikian pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Dalam pandangan ini, keragaman pertumbuhan ekonomi itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.

Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan juga harus diarahkan untuk memiliki tujuan memberantas permasalahan kemiskinan, keadilan yang seadil adilnya dan mampu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu secara sadar pembangunan berkelanjutan mampu untuk melakukan investasi sebanyak mungkin yang dimana dalam melakukan sebuah investasi nantinya akan memberikan dampak meningkatkan perekonomian sehingga nanti nya aspek seperti kesehatan pendidikan serta akses untuk mendapatkan hak sebagai warga negara semakin mudah.

Ada beberapa hal penting lainnya yang memang harus diperhatikan untuk menyusun sebuah pembangunan berkelanjutan yaitu berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut 3 Pilar Pembangunan berkelanjutan). Selain itu Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka

Jadi Tujuan akhir setiap usaha pembangunan ialah memperlakukan manusia, laki laki, perempuan, anak-anak sebagai tujuan, untuk memperbaiki kondisi manusia dan memperbesar pilihan manusia. Salah satu yang menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan

adalah dimensi manusia atau bisa juga disebut dengan 'pembangunan manusia. Ada empat komponen utama dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu pemerataan atau kesetaraan (*equity*), berkelanjutan, produktivitas dan pemberdayaan.

Agenda 21, yang dideklarasikan pada Konferensi PBB tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan, atau KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil; merupakan cetak biru untuk keberlanjutan pada abad ke-21. Agenda 21 disepakati oleh banyak Negara dan pemerintah di dunia yang dipantau oleh Komisi Internasional tentang Pembangunan Berkelanjutan. Agenda ini membahas pembangunan masyarakat dan ekonominya dengan berfokus pada konservasi dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Prinsip-prinsip yang digariskan dalam Deklarasi RIO tentang Lingkungan dan Pembangunan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Manusia menjadi pusat perhatian dalam pembangunan berkelanjutan. Manusia berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif, selaras dan harmoni dengan alam.
2. Negara memiliki, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk memanfaatkan sumberdaya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan dan pembangunan ekonominya sendiri-sendiri; dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi atau kontrolnya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yuridiksi
3. Hak atas pembangunan harus dilaksanakan secara berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.
4. Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak boleh dianggap terpisah dari nya.
5. Semua Negara dan semua orang akan bekerja sama dalam tugas penting untuk memberantas kemiskinan sebagai kebutuhan yang mutlak bagi pembangunan berkelanjutan, dalam rangka mengurangi kesenjangan standar hidup dan untuk memenuhi kebutuhan mayoritas penduduk dunia.
6. Situasi khusus dan kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang kurang berkembang dan mereka yang paling rentan terhadap gangguan lingkungan, harus diberikan prioritas khusus. Tindakan internasional di bidang lingkungan dan pembangunan juga harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan semua negara.
7. Negara-negara harus bekerjasama dengan semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan

kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global, negara memiliki tanggung-jawab yang bersifat “*Common but differentiated*”. Negara-negara maju mengakui tanggung-jawabnya dalam upaya internasional untuk pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan tekanan masyarakatnya terhadap lingkungan global, serta teknologi dan sumberdaya keuangan yang mereka kuasai.

8. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih tinggi bagi seluruh rakyatnya, negara harus mengurangi dan menghilangkan pola-pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan dan mempromosikan kebijakan demografis yang lebih sesuai.
9. Negara-negara harus bekerjasama untuk memperkuat pembangunan kapasitas endogen untuk pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pemahaman ilmiah melalui pertukaran pengetahuan ilmiah dan teknologi peningkatan pengembangan, adaptasi, difusi dan transfer teknologi, termasuk teknologi baru dan inovatif.
10. Isu-isu lingkungan paling bagus ditangani dengan partisipasi seluruh warga masyarakat, sesuai dengan tingkatannya. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi tentang lingkungan yang diselenggarakan oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan-bahan dan aktivitas yang berbahaya dalam komunitasnya, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran masyarakat dan partisipasinya dengan menyediakan informasi seluas-luasnya. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif, termasuk ganti rugi dan remediasi, harus disediakan sebaik-baiknya.

#### **Ketergantungan Pada Dana Bantuan Stimulan**

Emerson sebagai pelopor teori ketergantungan sumber daya atau (*resource dependence theory*), mengidentifikasi pembahasan teori ini dalam hubungan kulaitas antara konsep kekuasaan dengan konsep ketergantungan yang diasumsikan terdiri atas A dan B. Menurutnya A yang memiliki kekuatan lebih mampu memberikan pengaruh terhadap B, hal ini dapat didasarkan pada ketergantungan sumber daya. Ketergantungan yang dialami oleh B adalah keadaan yang seimbang dengan kepentingan B di atas tujuan A dan secara tidak langsung dan sebaliknya seimbang dengan kegunaan dari tujuan-tujuan tersebut pada B diluar hubungan A-B ketergantungan merupakan bagian utama dari kekuasaan.

Pfeffer dan Salancik beranggapan bahwa solusi yang paling umum terhadap masalah inheren

pada saling ketergantungan adalah peningkatan pengawasan yang menguntungkan/bermanfaat bagi setiap sumber yang lain (Pfeffer dan Salancik, 1978). Seringkali lingkungan tidak memberi banyak sumber dukungan alternatif apabila kapasitas dukungan terpusat pada lingkungan tugas maka organisasi mencari kekuasaan relatif pada pihak kepada siapa mereka tergantung. *Resource Dependence Theory* berargumen bahwa agar organisasi dapat survive, ia harus memperoleh *resources*.

Pendekatan ini lebih banyak memberikan kendali pada individu atas bagaimana mereka menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kehidupan mereka. Kebutuhan masyarakat tidak selalu bersifat pribadi tetapi saja juga dapat dibentuk melalui berbagai kondisi sosial. Dengan kata lain kebutuhan, motif dan penggunaan bantuan oleh masyarakat bergantung pada faktor faktor dari luar yang mungkin tidak dapat dikendalikan oleh individu itu sendiri.

Dewasa ini, semakin terasa betapa pentingnya hubungan ekonomi di kalangan masyarakat hingga tidak ada satu masyarakat pun yang dapat menjalankan sistem perekonomian tertutup atau subsisten. Perekonomian suatu para masyarakat semakin bergantung pada keadaan ekonomi dalam negara itu sendiri. Ketergantungan terhadap bantuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat juga disebabkan oleh penerapan sistem komando yang bersifat instruktif sebagai dampak dari pendekatan pembangunan *top down*, hal ini membuat masyarakat bersifat menunggu program dari atas. Faktor faktor penyebab timbulnya ketergantungan merupakan sebuah indikator dari timbulnya keadaan ketergantungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya ketergantungan pada individu, yaitu faktor internal, keadaan ekonomi masyarakat dan ketersediaan dana bantuan.

Terus meningkatnya pengguna bantuan dana belakangan ini membuat keberadaannya sangat dinanti nanti oleh masyarakat. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan dengan mendapatkan bantuan dana tersebut. Dana tersebut memungkinkan untuk melakukan berbagai hal yang dimana mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, membantu finansial masyarakat sehari hari dan mampu mengembangkan kemampuan masyarakat. Model model ketergantungan terhadap bantuan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ketergantungan pada bantuan finansial pada pengusaha perempuan serta ketergantungan bantuan modal pada pengusaha perempuan.

#### **Dampak Keberlanjutan Program PNPM Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Ketergantungan Bantuan Dana Stimulan Bagi Pengusaha Perempuan Baru.**

Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tabrakan atau benturan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai benturan, pengaruh yang kuat menguntungkan akibat (baik negatif maupun

positif). Sedangkan secara sosiologis dapat diartikan sebagai penggunaan konsep dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial dalam artian dampak sosial merupakan efek dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dampak bersifat positif dan negatif. Selain itu dampak juga dapat diartikan sebagai kerusakan baik yang berasal dari lingkungan maupun keadaan sosial, dimana kejadian tersebut mampu menimbulkan sebuah keadaan penurunan kualitas dan penggunaan sistem nilai dalam ketenangan hidup masyarakat. Dampak yang timbul dapat berupa Dampak yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya. Dampak dalam kehidupan masyarakat yang di akibatkan oleh suatu kebijakan atau program akan terimbas pada tiga subsistem yang paling *interaktif* yakni system social, system ekonomi dan sistem fisik (lingkungan). Dampak muncul ketika terdapat aktivitas proyek, program atau kebijakan yang akan diterapkan pada suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi keseimbangan pada suatu system masyarakat. Pengaruh itu biasanya positif maupun negatif, hal itu dapat di uji dari nilai, norma, aspirasi dan kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan. Ruang lingkup dari dampak suatu perubahan paling tidak mencakup aspek demokrasi sosial ekonomi institusi dan psikologis serta sosial budaya(Departemen Sosial).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :

- Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan,
- Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building), dan
- pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah

perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri, dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia.

Sebagian dana yang ada pada program pemberdayaan ini memang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih berkembang dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Selain itu dana yang diberikan melalui program pemberdayaan ini juga bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur di desa yang dimana infrastruktur sendiri memiliki peran yang cukup penting untuk membangun sebuah perekonomian di pedesaan. Pemerintah berupaya sebaik mungkin agar mengurangi transmigrasi sehingga melakukan pembangunan ekonomi pada pedesaan dengan cepat. Seiring dengan berjalan program pemberdayaan masyarakat ini, memang memunculkan berbagai reaksi atau dampak dari implementasinya, dampak dampak yang muncul memang ada yang bersifat negatif ada pula yang bersifat positif. Dampak negatif yang muncul dari adanya program pemberdayaan ini sendiri adalah, adanya keadaan ketergantungan pada masyarakat terhadap bantuan dana yang diberikan. Salah satu kasus empiriknya adalah pada pemberian dana stimulan.

Dana stimulan yang diberikan pemerintah memang tujuannya untuk menstimulasi agar masyarakat mampu berkembang. Dana stimulan ini berupa pemberian modal yang dipinjamkan kepada masyarakat khususnya kaum perempuan yang ingin memulai usaha baru. Pinjaman modal yang diberikan pada program pemberdayaan ini memang dapat di angsur selama 10 bulan. Dana stimulan ini sangat mudah sekali di dapatkan kaum wanita yang memang ingin memulai usaha, sehingga partisipasi kaum wanita ini cukup tinggi. Pemberian bantuan dana stimulan ini sudah lama berjalan, dan dapat dipastikan bahwasannya memang para kaum wanita juga sudah lama menggunakan dana bantuan pemerintah tersebut.

Penggunaan yang secara berkala tersebut yang akhirnya menciptakan suatu keadaan dimana masyarakat mengharapkan bantuan itu setiap periodenya. Keadaan ketergantungan ini tentu saja terdapat pada masyarakat yang menggunakan dana bantuan tersebut yaitu kaum wanita yang ada di Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo.



Dampak Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap peningkatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dari kegiatan fisik maupun non fisik memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat antara lain dalam peningkatan perekonomian dapat membuka usaha baru, mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan terpenuhinya biaya pendidikan anak-anak. Peningkatan perekonomian yang dirasakan oleh pengusaha baru yang membangun usahanya dari dana bantuan program pemberdayaan memang dirasa cukup.

Bantuan dana stimulan ini sendiri diharapkan agar mampu untuk menjadi bantuan modal awal agar masyarakatnya dapat membantu masyarakat perempuan menciptakan lapangan pekerjaan. Seiring dengan berjalannya waktu dana stimulan ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat perempuan sebagai modal awal untuk membangun sebuah perusahaan, akan tetapi juga digunakan untuk membantu ekonomi secara finansial. Adanya fungsi lain dari bantuan dana stimulan ini juga sudah berbeda dengan tujuan dari awal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman tujuan. Permasalahan yang timbul dalam penggunaan dana tersebut diakibatkan dari intensitas pemberian dana bantuan yang diberikan. Keadaan yang timbul saat inilah yang disebut sebagai dampak terhadap penggunaan bantuan dana stimulan.

Kehidupan pengusaha perempuan baru pada dasarnya sangat bergantung dengan adanya bantuan dana stimulan dari pemerintah. Bantuan dana stimulan ini dapat digunakan oleh pengusaha baru untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Di lain pihak pemerintah memiliki banyak kepentingan untuk mengentaskan kemiskinan yang dimana tentunya pemerintah juga mengalokasikan dana negara untuk lain lain. Seiring dengan berjalannya program ini, ditengarai timbulnya ketergantungan yang meningkat. Penggunaan bantuan dana stimulan setiap tahunnya bertambah, hal ini tentunya selaras dengan tingkat ketergantungan terhadap pengusaha perempuan baru.

Pada dasarnya Usaha kecil merupakan usaha yang mampu bertahan karena usaha kecil juga berperan dalam pemerataan perekonomian Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta memiliki potensi untuk menghasilkan devisa bagi negara. Peran wirausaha sangat tidak diragukan lagi dalam menghadapi perkembangan ekonomi saat ini. Karena tumbuh tidaknya perekonomian suatu negara juga bergantung pada kehadiran dan keaktifan para wirausaha. Wirausaha yang dimaksud adalah para pengusaha yang mandiri yang memiliki kebebasan dalam memilih karier sesuai dengan bidang usaha yang diminatinya serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya.

Industri kecil yang dibentuk dari bantuan dana program pemberdayaan memiliki potensi yang sangat besar untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi. Pengusaha baru masih lemah dalam hal permodalan. Peningkatan kemandirian pengusaha baru seyogyanya menjadi tujuan utama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. kemandirian pengusaha baru ini dapat diartikan sebagai kemampuan pengusaha perempuan baru tersebut mengembangkan usaha dengan mengerahkan kemampuannya sendiri tanpa bantuan modal dari pihak lain.

Selain itu ada penyebab lain yang menyebabkan pengusaha baru memiliki tingkat kemandirian yang rendah adalah mereka masih belum mampu untuk bergabung dengan individu lain untuk membentuk kerjasama agar usahanya maju. Dalam hal pengembangan usaha erat kaitannya dengan tingkat kemandirian, karena untuk membuat usaha yang baik dibutuhkan tingkat kemandirian yang tinggi dan tidak bergantung pada bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah saja.

Dalam perkembangannya banyak usaha kecil yang tidak mampu bertahan lama dan mudah mengalami kebangkrutan. Kemampuan pengusaha kecil untuk mampu bertahan dan cukup berhasil dipengaruhi beberapa faktor dalam kewirausahaan diantaranya, kreativitas dan inovasi.

Keberhasilan dalam dunia usaha memang hendaknya didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memang memiliki pendidikan yang cukup, memiliki keterampilan manajemen dan bisnis yang memadai. Untuk memenuhi hal ini tentunya pemerintah sebagai penyelenggara membekali para pengusaha baru dengan keterampilan dan memberikan pendampingan terhadap pengusaha baru. Sebagai pengusaha baru juga diharapkan untuk memiliki daya saing dengan produk dengan kualitas yang baik.

#### KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yakni dari hasil penelitian tentang dampak dari keberlanjutan Program PNPM Mandiri Pedesaan terhadap ketergantungan yang terjadi pada pengusaha perempuan yang ada di Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. program PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Jombang mengalami keberlanjutan. Keberlanjutan yang dilakukan dalam Program PNPM Mandiri Pedesaan ini dipicu oleh 4 indikator, yaitu :

- a. Keberlanjutan kebutuhan Masyarakat. sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kabupaten Jombang memang masih hidup dalam kemiskinan, karena sebagian besar mereka bekerja sebagai petani.

Tentunya untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Jombang pemerintah perlu memperhatikan aspek aspek seperti kebutuhan masyarakat, agar setiap upaya yang dilakuka oleh pemerintah mmemberikan output seperti yang direncanakan. Kebutuhan masyarakat akan bantuan yang diberikan oleh pemerintah memang masih besar. Karena pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat yang sebagian besar sebagai petani belum mampu untuk menutupi kebutuhan mereka sehari hari.

b. Ketersediaan Bantuan Dana Stimulan, tentunya hal ini menjadi hal yang paling penting dalam setiap keberlanjutan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan masih tersedianya dana bantuan stimulan lah pemerintah mampu membantu masyarakat mendirikan sebuah usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka terutamanya pada masyarakat perempuan.

c. Keberlanjutan Partisipasi Masyarakat, agar kita mengetahui bahwasannya program tersebut mampu berjalan dengan baik di masyarakat atau tidak tentunya jumlah partisipasi masyarakat lah yang mampu dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan. Namun jumlah partisipasi masyarakat juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur sebuah keberlanjutan dari program bantuan yang diberikan pemerintah, tentunya hal ini menyangkut Program PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo Kabupaten Jombang. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat hingga sekarang mampu membuat Program PNPM Mandiri Pedesaan ini dapat berjalan lebih lama dari pada perkiraan awal. Dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat yang terus meningkat, Program PNPM Mandiri Pedesaan mampu dilakukan secara berkelanjutan.

d. Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur, merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam Program PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Jombang. Dengan adanya keberlanjutan dari pembangunan infrastruktur ini juga dapat menandai bahwasannya Program PNPM Mandiri Pedesaan masih berjalan.

2. Dari adanya keberlanjutan pada Program PNPM Mandiri Pedesaan yang dilakukan di Dusun Carangpuspo Desa Carangrejo Kabupaten Jombang, ternyata mampu memberikan dampak negatif terhadap pengusaha perempuan selaku penerima bantuan dana stimulan yang berupa simpan pinjam perempuan. Dampak negatif tersebut adalah munculnya keadaan ketergantungan pada pengusaha perempuan baru terhadap bantuan dana stimulan yang di berikan dalam Program PNPM Mandiri Pedesaan.

3. Dampak ketergantungan yang muncul pada pengusaha perempuan baru terhadap keberlanjutan

Program PNPM Mandiri Pedesaan ini dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu :

a. Faktor Internal, merupakan faktor yang berasal dari individu pengusaha perempuan masing masing. Faktor ini mampu memicu penurunan etos kerja dari pengusaha perempuan sebab dengan adanya bantaun dana stimulan yang berupa simpan pinjam perempuan, mereka tidak perlu berusaha secara maksimal agar mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

b. Keadaan Ekonomi Masyarakat, merupakan salah satu penyebab ketergantungan tersebut timbul. Keadaan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha perempuan memang masih tergolong belum stabil. Keadaan inilah yang akhirnya mendorong masyarakat perempuan untuk menggunakan bantuan dana stimulan secara rutin, selain untuk modal, mengembangkan usaha nya bantuan dana stimulan ini juga tak jarang digunakan oleh masyarakat untuk biaya hidup sehari hari.

4. Dari keadaan ketergantungan yang timbul pada Pengusaha perempuan dapat dibedakan menjadi 2 model ketergantungan berdasarkan kegunaannya, yaitu :

a. Ketergantungan Finansial pada Pengusaha Perempuan Baru, dampak ketergantungan finansial yang terjadi pada pengusaha perempuan baru akibat keberlanjutan Program PNPM Mandiri Pedesaan ini dikarenakan, bantuan dana stimulan yang berupa simpan pinjam masyarakat perempuan ini juga digunakan oleh para pengusaha perempuan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka sehari hari, sehingga

b. Ketergantungan Bantuan Modal Pada Pengusaha Perempuan. Program PNPM Mandiri Pedesaan memberikan bantuan kepada masyarakat perempuan berupa bantuan dana stimulan agar masyarakat perempuan mampu mendirikan usaha sendiri, dengan begitu masyarakat mampu meningkatkan pendapatan keluarganya. Sehingga dampak ketergantungan yang timbul akibat adanya keberlanjutan Program PNPM Mandiri Pedesaan juga pada ketergantungan modal pada pengusaha perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Rujukan Buku:

- Abbas Salim, 2003, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat Pengembangan Akuntansi*. Yogyakarta : Erlangga.

- Benedicta, Dwi Prihatin. Riyanti. 2003. Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian. Jakarta : Grasindo.
- Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston. 2009. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Budimata Arief. 2007. Kekuasaan dan Pengusaan Sumber Daya. Jakarta : ICSD
- Buku Satu, Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Ali Akbar Yulianto. Jakarta: Salemba Empat.
- Brundtland Report. 1987. Our Common Future. Inggris : Oxford University Press, Oxford
- Bugin, Burhan.2010. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali Press
- Creswell, W John. 2016. Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Earth Summit Agenda 21 , Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan
- Elly M. Setiadi Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi. Jakarta : Kencana.
- Firdaus, Rachmat. Maya Ariyani. 2004. Manajemen Perkreditan Bank Umum Bandung : Alfabeta
- Furchan Alief. 2007. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadari, Nawawi. 2001.Administrasi Pendidikan. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Hermawan Agus. 2012. Komunikasi Pemasaran. Jakarta : Airlangga.
- Harahap, Sofyan, 2013. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta : Rajawali Pers.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta : Erlangga.
- Jarnasy, Owin. 2004. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta : Blantika.
- Khosman Ali. 2015.Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Marlina, Ani, 2009, karakteristik untuk mendefinisikan sustainable, wordpress: Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan, dkk. 2014. Metode penelitian survey. Jakarta : Kencana.
- Nasution, S. 2012. Metode Research. Jakarta : Bimi Aksara.
- Nazir, Moch. 2011. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Parsudi Suparlan. Kemiskinan dalam ( individu, keluarga dan masyarakat ). Jakarta : akademika presindo.
- Pleffer Jefferey, Salancik Gerald. 2003. The External Control of Organization A Resource Dependence Persepective. Stanford : Stanford University Press
- Salim Emil. 2010. Pembangunan Brekelanjutan Peran dan Kontribusi. Jakarta : Kepustakaan Terpopuler Gramedia
- Satori, Djama'an & Aan, K. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Satria, Arif dkk. 2012 Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta : Grasindo.
- Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. Membangun Perekonomian Rakyat. 1998. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarmadji, Slamet et al. 1996. Prosedur Analisis Bahan Makanan dan Pertanian. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Suwarsono dkk. 2006. Teori Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Surya Sari. 2011. Analisis Kinerja Dana Bergulir PNPM Mandiri di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Jurnal Administrasi

Bisnis. Vol.7. Center for Business Studies. FISIP – Unpar

[page 775.html](#) diakses pada tanggal 07 Februari 2017 pukul 14.00 WIB.

Suryawati. 2004. Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta. Hal 15

Website PNPMM Mandiri Pedesaan Kabupaten Jombang. *Program PNPMM Mandiri Pedesaan Di Kabupaten Jombang*. Diakses dari <http://pnpmmpdjombang.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 07 Februari 2017 pukul 14.00 WIB.

Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Semarang : Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Vol. 1.

Peraturan perundangan pembangunan. *Peningkatan Penanggulangan Efektivitas Kemiskinan*. Diakses dari <http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/248758368.doc> diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 10.30 WIB

Swasono. 2005. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Perkumpulan Pra Karsa. Jakarta : Perkumpulan Prakarsa.

Trimo Pamudji Al Djono. Analisis Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan (Kajian Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Sebagai Model Generik Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan ). 2011. Jakarta : Universitas Indonesia.

Website tim penanggulangan Kemiskinan. *klaster II kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat PNPMM Mandiri*. Diakses dari <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-ii/kelompok-program-berbasis-pemberdayaan-masyarakat-pnpm-mandiri/> diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 10.45 WIB.

Todaro, Michael P, dan Smith, 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia. Jakarta : Erlangga.

Website kabupaten bantul. *Rencana Program Pembangunan Infrastruktur*. Diakses dari <http://kec-pundong.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2016/09/BABI.pdf> diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 11.00 WIB

Ulber Silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama

World Bank Group. 2015. *Studi Penilaian Penerima Manfaat Pnpm/Respek* (Rencana Strategis Pembangunan Kampung). Jakarta : PNPMM Support Facility.

Website PNPMM Mandiri. *Program Pemberdayaan Pengembangan Infrastruktur* Diakses dari <http://www.pnpm-pisew.org/read.php?jenis=editorial&id=38> diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 11.00 WIB

William Carter. 2009. Akutansi Biaya ( Cost Accounting ). Jakarta: Salemba Empat.

Yunus, Saifuddin and T, Alfiady. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. *Jurnal Public Interest*. Vol 1. No 13.

Website PNPMM Madnri di Sumatra Utara. *PNPMM Mandiri di Kota Sumatra Utara*. Diakses dari <https://p2dtksulut.wordpress.com/program/> diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 14.15 WIB

**Website:**

<http://www.duniaesai.com/index.php/direktori/esai/37-ekonomi/114-mengapakemiskinan-di-indonesia-menjadi-masalah-berkelanjutan.html> diakses pada tanggal 22 Desember 2016, pukul 17.00 WB.

World Bank. *Support PNPMM Mandiri Indonesia*. diakses dari <http://www.worldbank.org/in/results/2008/07/17/indonesia-support-for-poor-and-disadvantaged-areas-project-pnpm-spada> diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 11.05 WIB

Website BPS terpilih dalam Inovasi Pelayanan Publik. *Jumlah masyarakat miskin di perkotaan dan di pedesaan*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229> diakses pada tanggal 20 desember 2016. 18.00 WIB.

Website pemerintahan daerah Jombang . diakses dari <http://mpdjombang.blogspot.co.id/p/blog->

